



SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN DENDA PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK?

Nur Farida Liyana,
Politeknik Keuangan Negara STAN
faridaliyana@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
29 Agustus 2019

Dinyatakan Diterima
23 September 2019

KATA KUNCI:

Perilaku, kepatuhan, pemeriksaan,
denda, pinalti, pajak

Diterima Pertama
[dd mmyyyy]

ABSTRACT

Tax compliance is the important role for optimizing tax revenue. Nowadays, many studies revealed there are psychological factor which determined tax compliance behavior. This study refers to behavioral theory to seek the rational behind decision making of tax compliance. Those variables are probability of being audited and penalty/fines. Therefore, survey had been conducted in Surabaya City involving 300 of taxpayers. The regression model shows a positive and significant effect. It means probability of being audited and fines have a positive impact on increasing tax compliance behavior. Therefore, Indonesian tax authority should give more attention on dissemination of audit and the taxation rule to increase tax compliance behavior.

ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk optimalisasi penerimaan. Dewasa ini banyak penelitian terkait faktor-faktor psikologi yang mendasari seseorang untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Teori perilaku ini yang mendasari penelitian ini untuk melihat adanya rasional pengambilan keputusan seseorang untuk patuh terhadap pajak. Diantaranya adalah adanya peluang dilakukan pemeriksaan dan adanya denda jika tidak patuh terhadap aturan pajak. Untuk itu dilakukan survey terhadap 300 Wajib Pajak di Surabaya. Dengan menggunakan analisis regresi diperoleh hasil positif dan signifikan bahwa adanya peluang diperiksa dan adanya denda mengakibatkan seseorang patuh terhadap pajak. Sehingga hal ini perlu untuk menjadi perhatian bagi institusi pajak di Indonesia untuk dapat melakukan diseminasi secara masif adanya peluang diperiksa dan denda terhadap setiap ketidakpatuhan pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pembiayaan utama negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Masalah utama yang dihadapi instansi perpajakan adalah rendahnya kemauan masyarakat Wajib Pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan salah satunya adalah kemungkinan diperiksa.

Kirchler (2007) menyebutkan bahwa banyak studi telah membuktikan bahwa adanya hubungan antara rata-rata pemeriksaan dengan perilaku kepatuhan perpajakan. Namun demikian efek dari pemeriksaan terhadap kepatuhan dinilai sangat kecil. Pada penelitian selanjutnya, Maciejovsky, Schwarzenberger dan Kircler (2011) mengungkapkan bahwa kemungkinan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepatuhan Wajib Pajak. Mereka menemukan bahwa menaikkan kemungkinan pemeriksaan akan meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Selain itu Wajib Pajak akan patuh jika mengetahui bahwa mereka akan dikenakan denda apabila mereka melanggar aturan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian terhadap perilaku kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak di Indonesia dengan studi kasus di Kota Surabaya untuk menjawab permasalahan "Apakah Pemeriksaan dan Denda Berpengaruh Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak?

Penelitian ini diharapkan akan dapat membantu instansi perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak.

1.1.1. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kirchler (2007) dan Maciejovsky, Schwarzenberger dan Kircler (2011) maka dalam penelitian ini hipotesis yang muncul adalah bahwa jika Wajib Pajak mengetahui bahwa dia akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka hal ini akan meningkatkan perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan. Selain itu adanya pengaruh positif adanya denda dan perilaku patuh pajak.

1.1.2. Research Design

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan survei di Wilayah Surabaya, Jawa Timur. Survei dilaksanakan pada tahun 2014, meskipun demikian masih dipandang cukup layak untuk dilakukan penulisan hasil survei pada saat ini karena perubahan perilaku masyarakat tidak akan berubah dalam waktu yang singkat. Survei dilakukan *face to face* untuk meningkatkan *response rate*.

Untuk penentuan jumlah sampel yang akan di survei, dilakukan penghitungan sebagai berikut berdasarkan rumus Krejcie dan Morgan (1970):

$$s = \frac{\chi^2 NP (1 - P)}{d^2 (N01) + \chi^2 P (1 - P)}$$

Dimana:

s = jumlah sampel yang dibutuhkan
 χ^2 = nilai dari tabel chi-square untuk tingkat kepercayaan 5%
N = jumlah populasi
P = proporsi populasi (diasumsikan 5%)
D = tingkat akurasi (5%)

Dikarenakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2014 di Surabaya sebesar 361.850 Wajib Pajak, dengan rumus tersebut di atas diperoleh 300 sampel yang akan diambil dengan menggunakan teknik sampling seperti akan dijelaskan selanjutnya.

Berdasarkan Tabel 1, Kota Surabaya terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan. Selain itu, terdapat 31 kecamatan, 160 kelurahan, 1.405 Rukun Warga dan 9.271 Rukun Tetangga¹. Dalam penelitian dilakukan 6 tingkatan teknik sampling sebagaimana berikut:

1. Sampling Stratifikasi untuk Tingkat Wilayah
Seperti dijelaskan di atas terdapat lima wilayah di Surabaya yaitu pusat, utara, timur, barat dan selatan. Untuk menentukan jumlah sampel masing-masing wilayah digunakan sampling stratifikasi dengan rumus sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} s$$

dimana,

n_i = jumlah sampel di wilayah i

N_i = jumlah populasi di wilayah i

N = jumlah populasi di Surabaya

s = jumlah sampel yang dibutuhkan (300 seperti dijelaskan sebelumnya)

sehingga hasil jumlah sampel masing-masing wilayah adalah Surabaya Pusat 45 responden, 60 responden Surabaya Utara, 5 responden untuk Surabaya Timur, 4 responden Surabaya Barat dan 5 responden untuk Surabaya Selatan.

2. Random Sampling Sederhana di Kecamatan
Untuk mempermudah berapa banyak kecamatan yang terpilih dengan sampling random sederhana ini maka masing-masing wilayah dibagi 15 sehingga diperoleh 3 kecamatan di Surabaya Pusat, 4 Kecamatan Surabaya Utara, 5 kecamatan Surabaya Timur, kecamatan Surabaya Barat dan 5 kecamatan Surabaya Selatan. Kemudian setelah dipilih jumlah kecamatan,

¹ Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya (2012) Data Informasi Umum Kota Surabaya

- dilanjutkan dengan pemilihan acak kecamatan tersebut.
3. Random Sampling Sederhana pada Tingkat Kelurahan
Untuk level kelurahan dipilih satu kelurahan untuk masing-masing kecamatan.
 4. Random Sampling Sederhana untuk Tingkat Rukun Warga (RW)
Untuk tingkat Rukun Warga sampling random sederhana dilakukan dengan cukup membagi dua jumlah rukun warga jika rukun warga genap, namun jika ganjil maka di pilih median dari RW tersebut.
 5. Random Sampling Sederhana untuk Tingkat Rukun Tetangga (RT)
Sama seperti tingkat RW, sampling random sederhana dilakukan dengan cukup membagi dua jumlah rukun tetangga jika RT berjumlah genap, namun jika ganjil maka di pilih median dari RT tersebut.
 6. Sampling sistematis untuk menentukan nomor rumah
Daniel (2012) menyebutkan bahwa sampling sistematis atau sampling interval adalah prosedur sampling probabilistic yang menggunakan random sampling pada tingkat pertama kemudian menentukan interval untuk sampel berikutnya. Dikarenakan akan diambil 15 responden untuk masing-masing RT maka jumlah rumah dalam RT tersebut dibagi 15. Misal ada 42 rumah tangga maka jika dibagi 15 diperoleh 3. Sehingga interval untuk rumah satu dan berikutnya adalah tiga. Kemudian untuk menentukan nomor rumah terpilih maka digunakan rumus:
$$r = (\text{modulo of a stage}) + 1 = 42 \text{ modulo } 15 + 1 = 12 + 1 = 13$$

dimana r adalah nomor rumah terpilih. Sehingga nomor rumah 13 adalah sampel pertama yang terpilih. Jika di rumah tersebut tidak ada yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan dipilih nomor setelahnya.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Untuk menguji apakah hipotesis yang telah kita bangun, perlu untuk mengetahui kerangka teori yang mendasari penelitian ini.

2.1 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pajak

Kircher (2007) mengemukakan bahwa fokus riset ekonomi berbasis perilaku mengenai perpajakan terutama pada sikap, norma, keadilan dan keputusan Wajib Pajak. Sehingga dia mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak menjadi 6 (enam) kategori yaitu perspektif politik,

perspektif sosial dan psikologi, representasi mental, persepsi pembuatan keputusan, *self-employment* dan interaksi antara institusi pajak dengan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai factor persepsi pembuatan keputusan (*decision making perspective*), mengapa Wajib Pajak mau untuk mematuhi ketentuan perpajakan?. Berdasarkan Kirchler (2007) seperti tergambar dalam Gambar 1, persepsi pembuatan keputusan adalah peluang dilakukan audit, denda dan penalti, dan penghasilan.

Slemrod, Blumenthal dan Christian (2001) telah melakukan sebuah survey pada 1700 Wajib Pajak di Amerika Serikat. Mereka mengirim surat yang memberitahukan bahwa Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak yang akan diperiksa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah mereka kirimkan ke kantor pajak. Diperoleh bahwa Wajib Pajak yang tidak patuh menunjukkan kenaikan pembayaran pajak jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk diperiksa meningkatkan keputusan seseorang untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Terkait dengan denda dan penalti, Friedland, Maital dan Rutenberg (1978) menemukan bahwa hukuman yang tinggi akan menghasilkan hasil yang efisien untuk menanggulangi penggelapan pajak. Kemudian Park dan Hyun (2003) melakukan riset eksperimental pada 15 mahasiswa S2 menggunakan TCMP (*Tax Compliance Measurement Program*) milik IRS (Internal Revenue Service-Institusi Pajak Amerika Serikat). Mereka menemukan bahwa tingkat penalti menjadi *deterrence effect* yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh tingkat penghasilan pada kepatuhan pajak masih ambigu. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang, semakin rendah tingkat kepatuhannya seperti yang ditemukan oleh Anderhub, Giese, Guth, Hoffmann dan Otto (2001), serta Wallshutzky (1984). Namun, Park and Hyun (2003) menemukan bahwa Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang sama meskipun tingkat penghasilannya berbeda. Kesimpulan ini juga didukung oleh Chan, Troutman dan O'Bryan (2000).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa secara statistik deskriptif tentang variabel demografi seperti jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan, penghasilan dan jenis pekerjaan. Setelah itu akan dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji beda rata-rata untuk mengetahui perbedaan antara kelompok penghasilan terhadap jawaban atas pertanyaan mengenai perilaku kepatuhan pajak.

Uji beda rata-rata yang digunakan adalah uji beda rata-rata dengan uji t digunakan untuk mengetahui perbedaan antara beberapa grup kemudian digunakan Uji Analysis of Variance (ANOVA) untuk mengetahui apakah hasil dari uji t tersebut

signifikan secara statistik. Uji ini digunakan untuk menguji tingkat penghasilan.

Terakhir akan dilakukan analisis regresi untuk memeriksa hubungan antara factor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Variabel seperti dijelaskan di bagian sebelumnya terdiri atas variable dependent yaitu perilaku kepatuhan pajak dan variable independen yaitu peluang dilakukan audit, denda dan penalti serta tingkat penghasilan.

Pertanyaan dalam kuesioner yang dapat menjadi data penghitungan masing-masing variable adalah sebagai berikut:

1. Peluang diperiksa
 - i) Apakah kemungkinan diperiksa oleh pemeriksa pajak mempengaruhi keputusan Anda untuk tidak melaporkan sebagian pendapatan Anda di SPT Tahunan?
 - ii) Bagaimana menurut Anda kemungkinan Wajib Pajak di Indonesia tidak melaporkan sebagian pendapatan mereka di SPT?
2. Denda dan Pinalti
Responden dihadapkan dengan sebuah cerita:
Pak Andi adalah seorang sales eksekutif yang menerima gaji pokok dan komisi atas kinerja penjualannya. Komisi dibayar secara tunai dan tidak muncul pada lembar gaji. Dia tidak pernah menyatakan pendapatan komisi dalam SPT-nya setiap tahun. Komisinya adalah Rp 5.000.000 pada tahun 2012. Dalam penilaian tahun 2012 DJP memeriksanya dan memberikan pinalti 10% (Rp 500.000) atas dasar menyembunyikan pendapatan komisi. Kemudian diberikan pertanyaan:
 - i. Akankah pinalti tahun lalu akan mempengaruhi keputusan anda untuk tidak melaporkan komisi yang anda terima tahun depan?
 - ii) Bagaimana kemungkinan anda tidak melaporkan komisi yang anda terima?
3. Tingkat Penghasilan per bulan
 - i) <Rp2.000.000
 - ii) Rp 2.000.000 -Rp 5000.000
 - iii) Rp 5.000.000 -Rp 10.000.000
 - iv) Rp 10.000.000 -Rp 20.000.000
 - v) >Rp. 20.000.000

Setelah terbentuk variabel, selanjutnya adalah membangun model. Model regresi yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$TC = \beta_0 + \beta_1 AUDIT + \beta_2 PEN + \delta_1 INCOME + e$$

Dimana;

TC = Tax compliance behavior (Kepatuhan Pajak)
AUDIT = peluang dilakukan pemeriksaan
PEN = pengenaan denda/penalty
Income = tingkat penghasilan yang merupakan variable dummy.

Nilai dari variabel kepatuhan pajak diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan seperti pada Tabel 2 di halaman ilustrasi tabel.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 300 responden, 155 adalah Wajib Pajak perempuan sedangkan 145 terdiri dari Wajib Pajak laki-laki. Berdasarkan Gambar 2 di ilustrasi grafik, 81 responden di bawah 30 tahun, 6 responden berusia 31 sampai 40 tahun, 64 responden berusia 41 sampai 50 tahun dan 92 responden diatas 50 tahun.

Sebagian besar responden sudah menikah dengan jumlah 233 orang dan 52 orang masih belum menikah sementara 15 orang pernah menikah. Dilihat dari tingkat pendidikan, 78 orang atau 25.33% responden memiliki pendidikan sampai dengan SMA dan 66.67% (200 orang) memiliki ijazah diploma dan sarjana. Sementara sisanya 24 orang memiliki pendidikan master dan doctoral.

Angka tingkat pendidikan ini jika dibandingkan dengan kondisi riil demografi Surabaya tidak memiliki kecocokan. Hal ini disebabkan karena responden merupakan Wajib Pajak dimana penghasilan sudah di atas penghasilan tidak kena pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bukan merupakan kategori orang miskin sehingga tingkat pendidikannya sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan mayoritas penduduk di Surabaya.

Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat pendidikan di Kota Surabaya didominasi oleh lulusan SMA dengan angka 27% sementara penduduk yang tidak lulus SD sebanyak 21.5% dan 26% lulus SMP. Sehingga bisa disimpulkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk Surabaya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Sementara dari jenis pekerjaan, kategori terbesar merupakan karyawan swasta dengan total 37.33% dari jumlah responden. PNS menempati tempat kedua dengan 35.333% dan wiraswasta sebesar 18.33%. Dari jumlah tersebut sebagian besar PNS memiliki penghasilan di bawah Rp 20.000.000,- sementara sebagian besar responden yang memiliki penghasilan di atas Rp 40 juta adalah wiraswasta.

Selanjutnya, ketika diberi pertanyaan mengenai apakah responden sudah pernah diperiksa? 288 responden menjawab belum pernah dan hanya 12 orang yang mengatakan sudah pernah diperiksa. Seperti dijelaskan oleh Kirchler (2007), semakin tinggi terjadi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula deteksi dini terhadap ketidakpatuhan pajak. Pendapat ini juga diperkuat oleh Trivedi, Shehata dan Lynn (2003) serta Trivedi, Shehata dan Mestelman (2005) yang meneliti dampak pemeriksaan dengan temuan bahwa pelanggaran ditemukan lebih tinggi dengan kondisi tanpa adanya audit (pemeriksaan).

Temuan ini perlu menjadi evaluasi tersendiri bagi DJP terutama Kanwil DJP Jawa Timur I untuk meningkatkan pemeriksaan di kalangan orang pribadi di Surabaya. Banyak hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan, terutama terkait dengan Sumber Daya Manusia. Seperti diketahui, DJP kekurangan

pemeriksa pajak. Pada tahun 2014 dengan jumlah pegawai 32.000 orang hanya 4.113 yang menjadi pemeriksa pajak.

Jika kita bandingkan dengan pegawai National Tax Agency (NTA) – otoritas pajak Jepang – lebih dari 70% pegawai NTA merupakan pemeriksa pajak. Sehingga meningkatkan jumlah pemeriksa pajak merupakan tantangan sekaligus meningkatkan kualitas pemeriksaan itu sendiri.

4.2 Uji Beda Rata-Rata

Uji beda rata-rata ini dilakukan untuk melihat beda antar kelompok. Pada penelitian ini yang memiliki kelompok adalah tingkat penghasilan. Sebagaimana terlihat di Tabel 3, untuk tingkat penghasilan, tidak dapat dibedakan perbedaan tingkat kepatuhan pajak antar kelompok penghasilan. Hal ini dikarenakan nilai uji statistiknya insignifikan.

4.3 Analisis Regresi

Terkait analisis regresi, dilakukan analisis regresi linear berganda dengan metode stepwise. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan antara peluang dilakukan pemeriksaan, adanya denda atau pinalti dan tingkat penghasilan seseorang terhadap keputusan untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, dibangun model regresi dengan dependent variable adalah kepatuhan pajak dan variable independen nya adalah peluang pemeriksaan (audit), denda dan pinalti (penalt and fines) serta tingkat penghasilan (income).

Model regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$TC = 14.858 + 0.331AUDIT + 0.653PENFINES$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tanpa factor yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak adalah peluang dilakukan pemeriksaan dan adanya denda/pinalti. Sementara tingkat penghasilan seseorang tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Seperti yang diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan hipotesis awal, peluang dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang akan meningkatkan perilaku kepatuhan orang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan koefisien positif pada variable audit. Jika peluang dilakukan pemeriksaan dinaikkan 1, maka akan berpengaruh sebesar 0.331 terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Banyak penelitian yang sudah dilakukan memberikan bukti bahwa peluang dilakukan pemeriksaan akan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan oleh Kirchler (2007), Muehbachera, Mittone, Kastlunger and Kircher (2012), Serta Slemrod, Blumenthal dan Christian (2001).

Berdasarkan hasil tersebut, DJP harus meningkatkan deterrence effect kepada Wajib Pajak

dengan meningkatkan jumlah pemeriksaan. Pemeriksaan dinilai cukup efektif untuk membuat Wajib Pajak mau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah 1) Meningkatkan jumlah pemeriksaan dengan menambah jumlah Sumber Daya Manusia, 2) Bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga untuk memperoleh data dan bantuan yang dapat membantu jalannya pemeriksaan, 3) Merancang surat yang menyebutkan adanya peluang diperiksa bagi Wajib Pajak yang tidak patuh serta 4) Melakukan diseminasi atau penyuluhan tentang aturan perpajakan secara massif dan terstruktur.

Kemudian terkait dengan adanya denda dan pinalti ternyata membuat masyarakat takut sehingga mau untuk membayar pajak. Sebenarnya hal ini sudah ada dalam peraturan perpajakan Indonesia. Denda dan bunga akibat terlambat bayar maupun lapor sudah ada dalam Undang-Undang perpajakan kita. Namun demikian rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan ini membuat masyarakat seolah-olah menyepelekan untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

Untuk itu, terkait dengan temuan adanya hubungan positif antara denda dengan perilaku kepatuhan pajak, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempererat kerjasama dengan konsultan pajak dan lembaga lain untuk melakukan penyuluhan perpajakan terutama tentang peraturan dan adanya sanksi apabila melakukan tindakan tidak patuh terhadap pajak.
- 2) Inklusi kesadaran pajak dengan memasukkan materi-materi pajak terutama terkait dengan aturan global, adanya sanksi dll ke dalam kurikulum pendidikan maupun kurikulum pelatihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau swasta.
- 3) Penegakan hukum yang adil dan tegas. Hal ini harus dilakukan untuk membuat masyarakat memiliki efek jera bahwa institusi pajak tidak main-main dalam menetapkan aturan. Sehingga pelaksanaan sanksi dilakukan secara adil dan tegas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang positif antara peluang dilakukan pemeriksaan dan adanya sanksi perpajakan terhadap keputusan seseorang untuk mematuhi aturan perpajakan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai tindakan agar masyarakat mau untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Terkait dengan pemeriksaan DJP harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeriksaan dengan penambahan SDM, kerjasama dan diseminasi aturan pemeriksaan kepada masyarakat. Selanjutnya adanya sanksi perpajakan perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat baik melalui konsultasi maupun penyuluhan. Selain itu materi-materi aturan pajak perlu untuk didiseminasikan menyeluruh kepada

masyarakat dengan melakukan program-program kerjasama dan menuangkan materi pajak di kurikulum sekolah.

Kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak perlu untuk ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai aturan perpajakan termasuk sanksi-sanksi perpajakan. Terakhir penegakan hukum yang adil dan tegas perlu untuk memberikan efek jera ke Wajib Pajak yang tidak patuh serta membuktikan bahwa aturan pajak telah dilaksanakan secara serius.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada DJP dalam hal ini sebagai otoritas pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga penerimaan pajak dapat tercapai. Namun demikian, banyak keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah 1) Survei dilakukan tahun 2014 sehingga butuh data terbaru meskipun mungkin tidak akan jauh berbeda hasilnya, dan 2) Cakupan pengambilan data untuk dapat diperluas sehingga dapat dilakukan kesimpulan untuk seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Anderhub, Vital, Sebastian Giese, Werner Guth, Antje Hoffmann and Thomas Otto. (2001) Tax Evasion with Earned Income - An Experimental Study. *FinanzArchiv/Public Finance Analysis*. Vol. 58, No. 2: pp. 188-206. Tübingen: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG. Germany
- Chan, Chris W., Coleen S. Troutman, and David O'Bryan. (2000) An Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence from the United States and Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. Vol. 9, No.2: pp.83-103. Massachusetts: Elsevier, Inc. USA.
- Daniel, Johnnie. (2012) *Sampling Essential Practical Guidelines for Making Sampling Choices*. California: SAGE Publications, Inc. USA.
- Friedland, Nehemiah., Shlomo Maital, and Aryeh Rutenberg. (1978) A Simulation Study of Income Tax Evasion. *Journal of Public Economics*. Vol. 10: pp.107-116. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. Netherlands.
- Kirchler, Erich. (2007) *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press. UK.
- Krejcie, Robert V., and Daryle W. Morgan. (1970) Determining Sample Size for Research activities. *Educational and Psychological Measurement*. Vol. 30: pp.607-610. California: SAGE Publications, Inc. USA.
- Maciejovsky, Boris, Herbert Schwarzenberger and Erich Kirchler. (2012) .Rationality versus Emotions: The Case of Tax Ethics and Compliance. *Journal of Business Ethics*. Vol.109
- Park, Chang-Gyun., and Jin Kwon Hyun. (2003) Examining the Determinants of Tax Compliance by Experimental data: a Case of Korea. *Journal of Policy Modeling*. Vol. 25: pp.673-684. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. Netherlands.
- Slemrod, Joel., Marsha Blumenthal and Charles Christian. (2001) Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota. *Journal of Public Economics*. Vol 79: pp.455-483. Amsterdam: Elsevier B.V. Netherlands.
- Trivedi, Viswanath Umashanker, Mohamed Shehata, and Bernadette Lynn (2003) Impact of Personal and Situational Factors on Taxpayer Compliance: An Experimental Analysis. *Journal of Business Ethics*. Vol. 47, No. 3 (October): pp. 175-197. AK.Houten: Springer. Netherlands.
- Trivedi, Viswanath Umashanker, Mohamed Shehata, and Stuart Mestelman (2005) Attitudes, Incentives, and Tax Compliance. *Canadian Tax Journal*. Vol.53, No.1 .Toronto: Canadian Tax Foundation. Canada
- Wallshutzky, I.G. (1984) Possible Causes of Tax Evasion. *Journal of Economic Psychology*. Vol.5:pp.371-384. Amsterdam: Elsevier.B.V. Netherlands.

ILUSTRASI TABEL

Tabel 1 Nama Kecamatan, Kelurahan dan Jumlah Responden Terpilih

| Wilaya | Kecamatan | Kecamatan Terpilih | Kelurahan Terpilih | Jumlah Responden |
|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Central Surabaya | Bubutan | Bubutan | Gundih | 15 |
| | Simokerto | Simokerto | Simokerto | 15 |
| | Tegalsari | Tegalsari | Keputran | 15 |
| | Genteng | | | |
| North Surabaya | Semampir | Semampir | Sidotopo | 15 |
| | Pabean Cantian | Pabean Cantian | Nyamplungan | 15 |
| | Krembangan | Krembangan | Krembangan Selatan | 15 |
| | Kenjeran | Kenjeran | Tambak Wedi | 15 |
| | Bulak | | | |
| East Surabaya | Gubeng | Gubeng | Gubeng | 15 |
| | Tambaksari | Tambaksari | Pacarkeling | 15 |
| | Sukolilo | Sukolilo | Medokan Semampir | 15 |
| | Mulyorejo | Mulyorejo | Kalisari | 15 |
| | Rungkut | Rungkut | Medoan Ayu | 15 |
| | Tenggiling Mejoyo | | | |
| | Gunung Anyar | | | |
| South Surabaya | Wonokromo | Wonokromo | Ngagel | 15 |
| | Sawahan | Sawahan | Pakis | 15 |
| | Jambangan | Jambangan | Karah | 15 |
| | Karang Pilang | Karang Pilang | Kebraon | 15 |
| | Wiyung | Wiyung | Balas Klumprik | 15 |
| | Wonocolo | | | |
| | Gayungan | | | |
| | Dukuh Pakis | | | |
| West Surabaya | Tandes | Tandes | Karangpoh | 15 |
| | Sukomanunggal | Sukomanunggal | Simomulyo Baru | 15 |
| | Benowo | Benowo | Romokalisari | 15 |
| | Pakal | | | |
| | Sambikerep | | | |
| | Lakarsanti | | | |
| | Asemrowo | | | |
| Total | | | | 300 |

Tabel 2 Daftar Pertanyaan Untuk Mengukur Kepatuhan Pajak

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jika saya terdeteksi tidak melaporkan SPT dengan benar, saya percaya bahwa DJP akan mengerti dan akan dan kemungkinan besar saya tidak akan mendapatkan hukuman apapun. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Saya percaya DJP memiliki kemampuan yang terbatas untuk menyelidiki semua SPT Tahunan tahun pajak 2012, saya memiliki kesempatan untuk tidak melaporkan penghasilan sebenarnya saya pada tahun pajak 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Saya yakin bahwa probabilitas terdeteksi oleh DJP untuk tidak melaporkan penghasilan sebenarnya pada tahun pajak 2012 sangat rendah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Pemerintah menghabiskan dana dengan jumlah yang wajar untuk kesejahteraan masyarakat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Ada sejumlah layanan pemerintah, baik sarana dan prasarana untuk masyarakat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Pemerintah tidak menghabiskan banyak uang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Saya membayar jumlah pajak yang sama orang yang memiliki penghasilan yang sama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Orang berpenghasilan tinggi harus membayar pajak lebih banyak daripada orang berpenghasilan rendah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Dengan membayar pajak akan membantu orang miskin untuk hidup lebih baik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | SPT Tahunan sangat sederhana dan mudah dimengerti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Sanksi dan denda yang diterapkan secara serius mungkin membuat saya tidak patuh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Karena DJP sangat efisien dalam menangani masalah wajib pajak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tabel 3 Hasil Uji Beda Rata-Rata

| Variable | Categories | Mean | t-statistics/F-statistics | P-value | Note |
|----------|---------------------------------|-------|---------------------------|---------|---------------|
| Income | <Rp. 2.025.000 | 22.56 | 1.104 | 0.355 | Unsignificant |
| | Rp.2.025.001-Rp.4.166.667 | 24.08 | | | |
| | Rp. 4.166.668 - Rp. 20.833.333 | 24.78 | | | |
| | Rp. 20.833.334 - Rp. 41.666.667 | 23.93 | | | |
| | >Rp. 41.666.667 | 22.90 | | | |

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .473 ^a | .224 | .221 | 4.345 |
| 2 | .509 ^b | .259 | .254 | 4.251 |

a. Predictors: (Constant), PENFINE

b. Predictors: (Constant), PENFINE, AUDIT

ANOVA^c

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 1622.577 | 1 | 1622.577 | 85.962 | .000 ^a |
| | Residual | 5624.926 | 298 | 18.876 | | |
| | Total | 7247.503 | 299 | | | |
| 2 | Regression | 1879.454 | 2 | 939.727 | 51.993 | .000 ^b |
| | Residual | 5368.049 | 297 | 18.074 | | |
| | Total | 7247.503 | 299 | | | |

a. Predictors: (Constant), PENFINE

b. Predictors: (Constant), PENFINE, AUDIT

c. Dependent Variable: TCHQ

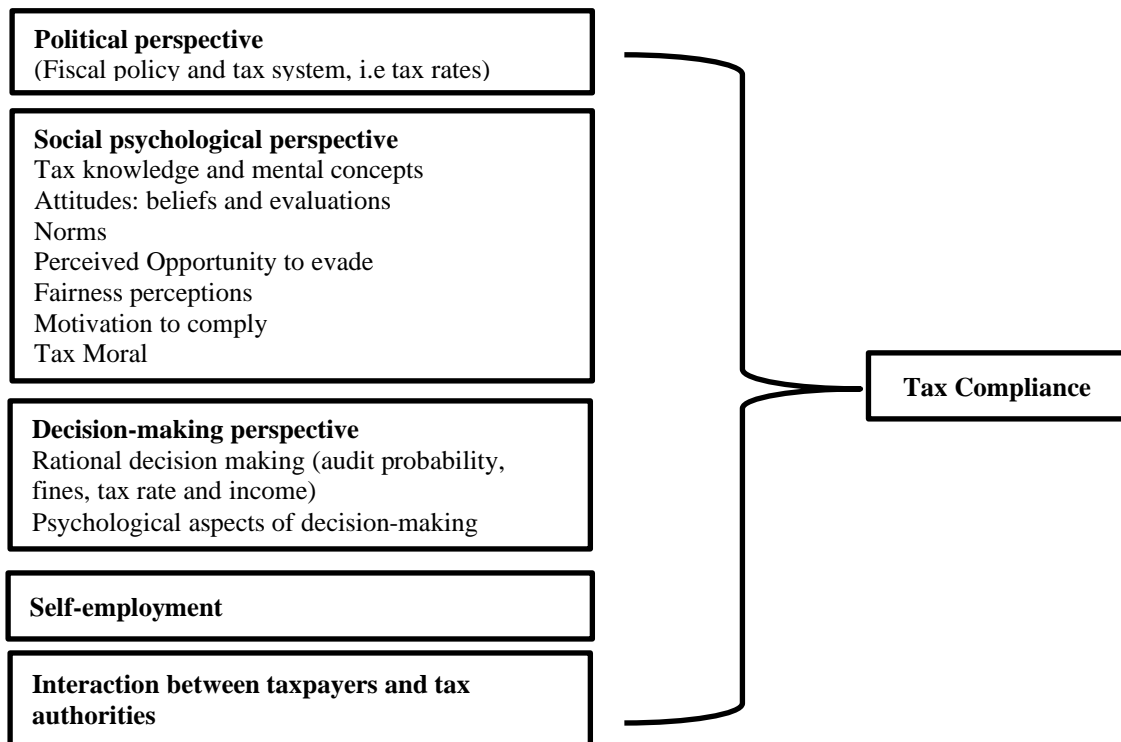
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 17.275 | .782 | | 22.081 | .000 |
| | PENFINE | .725 | .078 | .473 | 9.272 | .000 |
| 2 | (Constant) | 14.858 | .999 | | 14.880 | .000 |
| | PENFINE | .653 | .079 | .426 | 8.279 | .000 |
| | AUDIT | .331 | .088 | .194 | 3.770 | .000 |

a. Dependent Variable: TCHQ

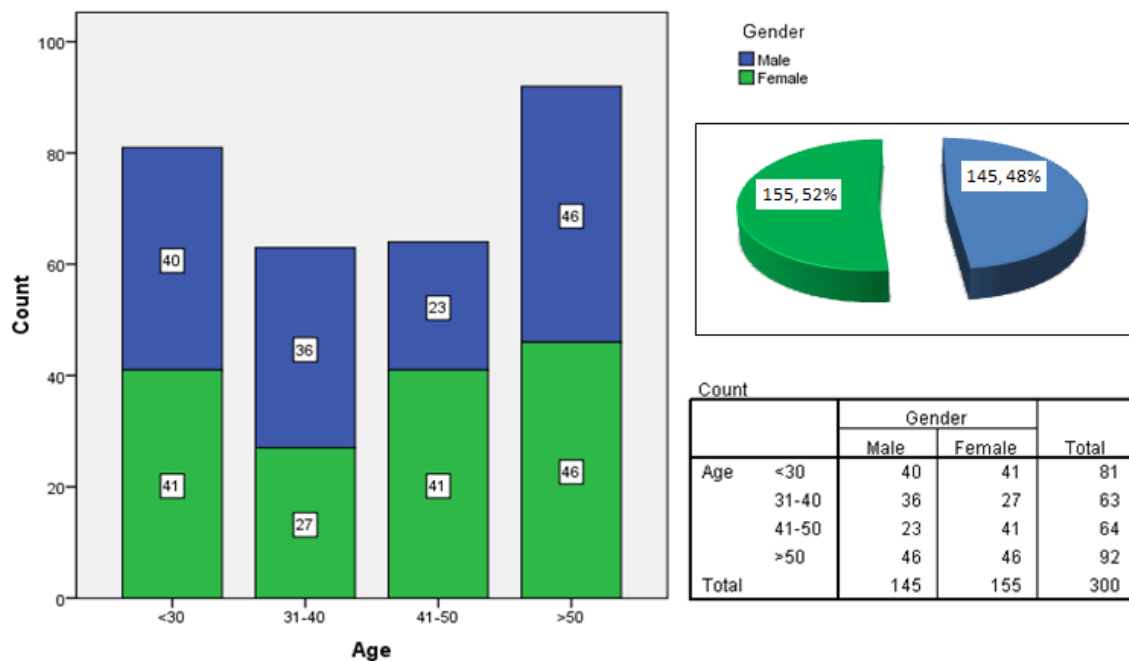
ILUSTRASI GRAFIK

Gambar 1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Perilaku Kepatuhan Pajak



Source: Erich Kirchler, The Economic Psychology of Tax Behavior. (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 3

Gambar 2. Grafik Deskriptif Usia dan Jenis Kelamin



Gambar 3. Grafik Deskriptif Pekerjaan dan Penghasilan

